

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mengoptimalkan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi suatu daerah, salah satu yang harus dicapai adalah kinerja keuangan yang baik. Menurut kamus Akuntansi Manajemen, kinerja dikatakan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non-keuangan

dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi.

Penilaian terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dinilai perlu dilakukan untuk memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang serta untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. (Agustina, 2013). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Halim (2002:126), hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

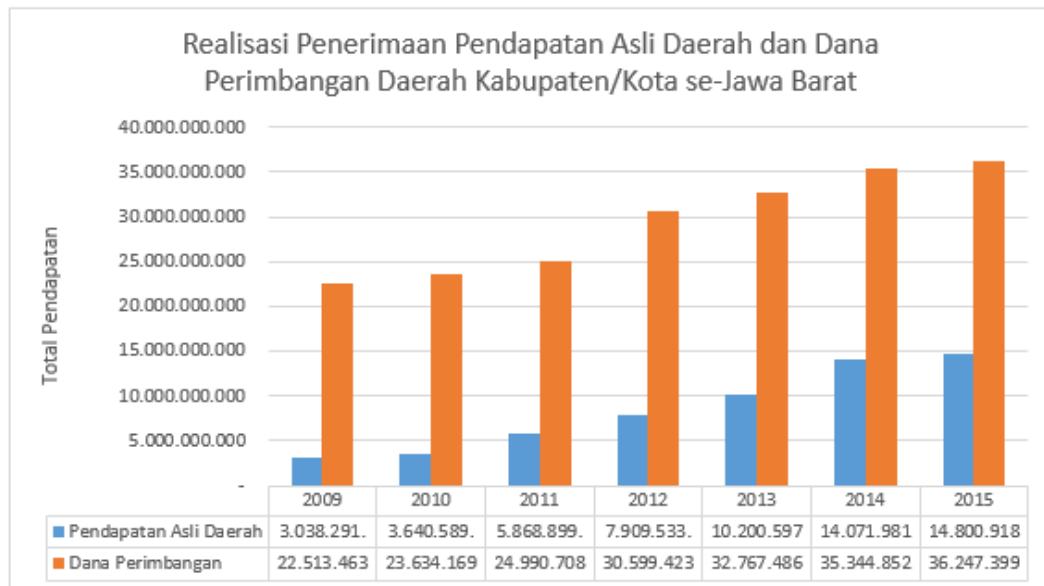
5. Melihat pertumbuhan / perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya dalam bidang keuangan. Maka sudah sepatutnya setiap pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangannya agar kinerja keuangannya dapat dinilai baik. Namun meskipun demikian, nyatanya tidak sedikit pemerintah daerah masih yang harus membenahi pengelolaan keuangannya. Seperti yang dilansir oleh Republica.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritisi ketergantungan pemerintah daerah pada alokasi transfer dana ke daerah. Seperti diketahui, transfer dana ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menjelaskan, sebanyak 46,6 persen APBD Provinsi masih bergantung pada suntikan transfer pemerintah pusat. Sementara, ketergantungan APBD Kabupaten/Kota menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu sebesar 66,4 persen. Ketergantungan tersebut juga nampak dari minimnya Penerimaan Asli Daerah (PAD). Mantan direktur pelaksana bank dunia itu mengatakan, pemerintah provinsi hanya mampu menyumbangkan PAD dalam bentuk pajak sebesar 37,7 persen dari total anggaran. Sementara, untuk kabupaten/kota, PAD hanya mampu menyumbang 6,6 persen. Sri Mulyani juga mencermati masalah dari sisi belanja APBD. Ia mengatakan, sebesar 37 persen alokasi belanja Pemda digunakan untuk belanja pegawai sedangkan belanja modal hanya 20 persen. Ia pun mengkritisi desain belanja di daerah yang ia sebut mengkhawatirkan. Ia meminta Pemda untuk lebih fokus menyusun program sesuai

tujuan prioritas. Ia mengaku, program yang tidak fokus justru tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. (www.republica.co.id, Agustus 2018).

Fenomena diatas mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah dimana daerah masih sangat bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Perimbangan masih menjadi sumber utama penerimaan pemerintah daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya memberi sedikit kontribusi dari keseluruhan penerimaan daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan sangat berpengaruh dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007).

Hal serupa pun terjadi pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat dimana penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pendapatan asli daerah pun meningkat dari tahun ke tahun, tetapi jumlahnya hanya memberi sedikit kontribusi terhadap total pendapatan dibandingkan dengan dana perimbangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2018)

Gambar 1. 1

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

Fenomena selanjutnya terkait kurang baiknya kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilansir oleh Tribun Jogja.com yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta pada triwulan II tahun 2018 menunjukkan angka realisasi 28,94 persen dari target yang ditetapkan yakni 51,51 persen. Hal tersebut membuat deviasi kinerja keuangan daerah tercatat sebesar 22,57 persen. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad, menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang membuat kinerja keuangan mengalami deviasi yang cukup besar. Diantaranya adalah pencairan kegiatan bersifat rutin menyesuaikan kebutuhan, keterlambatan surat pertanggungjawaban, efisiensi belanja narasumber, dan sebagainya. Selain itu, tambah Edy, hal lain yang memengaruhi kinerja keuangan adalah pengadaan obat RS Pratama yang masih

dalam proses, pengadaan ruang dan alat kedokteran bedah mundur dari tata kala, dan pada pengadaan tanah terdapat 1 lokasi yang gagal dan 1 lokasi mundur dari tata kala. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Riri Banowati menilai hal ini disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran. Ia pun memberikan masukan agar OPD di Pemkot melakukan pembangunan yang berpedoman pada rencana kerja sehingga target bisa tercapai. Ia berharap OPD Pemkot memastikan anggaran tepat sasaran dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Deviasi antara target dan realisasi segera dievaluasi untuk kemudian dilakukan intervensi yang belum sesuai target. (<http://jogja.tribunnews.com>, Agustus 2018).

Fenomena lain terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir seperti yang dilansir oleh Inhilklik.com berikut ini: Sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap belanja daerah masih sangat kecil, sehingga ketergantungan belanja daerah sangat bergantung pada transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, kepada Pemerintah Daerah agar dapat melakukan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Inhil. Menurut juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Muhammad Sabit, persoalan yang paling mendasar dan kelemahan ada pada semua Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana diketahui seluruh SKPD dan OPD tidak memiliki data yang Valid dan Reliabel, Terukur dan Terpercaya. Sehingga hal ini sangat menyulitkan untuk melakukan capaian target yang diinginkan, khususnya terhadap data pajak dan data restribusi yang belum tervalidasi datanya secara baik, dan berakibat terjadinya berbagai potensi kebocoran pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Lebih lanjut, Banggar DPRD Inhil juga menyorot tentang belanja modal dalam APBD Inhil terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun berdasarkan data yang ada dalam empat tahun terakhir. Sementara itu, belanja barang dan jasa dalam APBD Inhil terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam empat tahun terakhir. Dalam hal ini, Banggar DPRD Inhil juga menyarankan agar di masa yang akan datang dilakukan upaya dalam rangka efisiensi belanja barang dan jasa, serta efektifitas belanja modal, agar kualitas belanja APBD bisa ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, menuju Inhil yang berjaya dan gemilang 2025. (www.inhilklik.com, Agustus 2018).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Halim (2011:101), yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hasil penelitian Darsono (2013) menyatakan bahwa ada pengaruh langsung PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD merupakan komponen penting yang mencerminkan bagaimana Pemerintah Daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut. Sejalan dengan Anjani (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah maka Kinerja Keuangannya semakin baik atau semakin mandiri.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut. Hasil penelitian Budianto (2016) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun.

Andirfa, dkk (2016) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat

menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan. Menurut Halim (2012:126), gambaran kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, dan untuk bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya adalah:

1. Ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diteliti oleh Ilmiyyah, dkk (2017), Nugroho & Prasetyo (2018), Maiyora (2015), Marfiana & Kurniasih (2013), Sudarsana & Rahardjo (2013), Laila, dkk (2016), Masdiantini & Erawati (2016).
2. *Leverage* yang diteliti oleh Ilmiyyah, dkk (2017), Rochman (2015), Abidin (2017), Maiyora (2015), Laila, dkk (2016), Masdiantini & Erawati (2016).
3. Ukuran Legislatif yang diteliti oleh Ilmiyyah, dkk (2017), Rochman (2015), Abidin (2017), Maiyora (2015), Marfiana & Kurniasih (2013), Laila, dkk (2016).
4. Pertumbuhan Ekonomi yang diteliti oleh Rochman (2015)
5. Temuan Audit BPK yang diteliti oleh Ilmiyyah, dkk (2017), Marfiana & Kurniasih (2013).

Faktor-faktor tersebut lebih jelas lagi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Ukuran (size)	Leverage	Ukuran Legislatif	Pertumbuhan Ekonomi	Temuan Audit BPK
1	Nyayu Miftahul Ilmiyyah, Evada Dewata, dan Sarikadarwati	2017	×	×	×	-	×
2	Siti Nur Rochman	2015	-	✓	✓	✓	-
3	Tatas Ridho Nugroho dan Novi Eko Prasetyo	2018	×	-	-	-	-
4	Muhammad Burhan Abidin	2017	-	✓	✓	-	-
5	Gita Maiyora	2015	✓	✓	×	-	-
6	Nandhya Marfiana dan Lulus Kurniasih	2013	×	-	✓	-	✓
8	Hafidh Susila Sudarsana dan Shiddiq Nur Rahardjo	2013	×	-	-	-	✓
9	Laila, Herawati, dan Etikha	2016	✓	×	×	-	-
10	Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati	2016	✓	-	-	-	×

Keterangan:

Tanda ✓ = Berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tanda × = Tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mulia Andirfa, Hasan Bahari, dan M.Shabri A.Majid (2016) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh” populasi dalam penelitian terdahulu yaitu 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan di dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada pemilihan tahun pengamatan penelitian dan unit observasi yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan data tahun 2011-2013, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2012-2016. Kemudian perbedaan selanjutnya pada populasi penelitian. Populasi dari penelitian yang penulis lakukan yaitu pada 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk penggunaan indikator pengukuran kinerja keuangan, penelitian ini menggunakan rasio yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu rasio efisiensi.

Berdasarkan teori dan uraian diatas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah, yang terdiri dari:

1. Kemandirian pemerintah daerah dinilai rendah karena masih bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Anggaran belanja modal tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan infrastruktur disebabkan oleh kurang efisiennya pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.
2. Seberapa besar Dana Perimbangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.
3. Seberapa besar Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.

4. Bagaimana Kinerja Keuangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.
5. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.
6. Seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.
7. Seberapa besar pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui besarnya jumlah Dana Perimbangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui besarnya jumlah Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung serta dapat memberikan beberapa sumbangan positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu Akuntansi, khususnya dalam bidang kajian Akuntansi Sektor Publik.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai dasar teori untuk mengembangkan, memperluas teori-teori yang telah dipelajari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis terutama mengenai penerapan sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di dalam praktek kerja yang sesungguhnya pada Pemerintahan Daerah.
- c. Penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan maupun saran serta menjadi pertimbangan terutama dalam membenahi penerapan sistem pengendalian intern dan penempatan sumber daya manusia yang kompeten, yang nantinya berpengaruh kepada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memacu pada penelitian yang lebih baik.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai dengan selesai.